

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

Ahmad Bagus Rohim<sup>1)\*</sup>, Bayu Priambodo<sup>2)</sup>

(e-mail: [ahmadbagusrohim@gmail.com](mailto:ahmadbagusrohim@gmail.com)<sup>1\*)</sup>)

(\*) Corresponding Author

<sup>1), 2)</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

### ABSTRACT

Digitalization has become a part of life for all countries on this earth, including Indonesia. Digitalization has also penetrated all aspects of life in Indonesian society, making the government also participate in using digitalization in issuing policy products. One of the products of the government is the existence of Integrated Social Welfare Data (DTKS) under the auspices of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. Where the data contains poverty data collection for each region in Indonesia to facilitate the government in providing social assistance to people in need. This research wants to discuss how the implementation of DTKS management in Gresik Regency according to David C. Corten consists of program, organization, and beneficiary variables. This research uses a descriptive qualitative method with a research location at the Gresik Regency Social Service using primary data collection techniques in the form of interviews and observations, while secondary data in the form of utilizing the results of previous research with different locus. It was found that in its implementation, the Gresik Regency Social Service can implement DTKS management in accordance with the direction. Even so, in the organizational variables, there are still some obstacles that are often faced, such as several DTKS data holder operators at the urban village level who started to resign due to several reasons such as age, mutation, and so on.

**Keywords:** Implementation; Welfare; Social; Digitization

### ABSTRAK

Digitalisasi sudah menjadi bagian kehidupan bagi seluruh negara yang ada di bumi ini, termasuk di Indonesia. Digitalisasi juga sudah merambah ke dalam seluruh aspek kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia sehingga membuat pemerintah juga turut berpartisipasi dalam menggunakan digitalisasi dalam mengeluarkan produk kebijakan. Salah satu produk dari pemerintah adalah adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinaungi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dimana data tersebut berisi tentang pendataan kemiskinan setiap daerah yang ada di Indonesia agar mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini ingin membahas tentang bagaimana implementasi pengelolaan DTKS yang ada di Kabupaten Gresik menurut David C. Corten yang terdiri dari variabel program, organisasi dan pemanfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, sedangkan untuk data sekunder berupa memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dengan lokasi yang berbeda. Ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Gresik dapat melakukan implementasi pengelolaan DTKS sesuai dengan arahan. Meskipun begitu pada variabel organisasi masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi seperti terdapat beberapa operator pemegang data DTKS pada tingkat kelurahan yang menyatakan untuk mengundurkan diri karena dilandasi oleh beberapa hal seperti umur, mutasi dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** Implementasi; Kesejahteraan; Sosial; Digitalisasi

## I. PENDAHULUAN

Digitalisasi sekarang sudah menjadi pembahasan yang umum di masyarakat. Dimana dengan semakin berkembangnya

teknologi informasi dan komunikasi membuat manusia semakin mudah dalam menjalankan kehidupan mereka. Seperti yang kita tahu bahwa digitalisasi adalah perubahan pola

hidup masyarakat dari konvensional menuju lebih modern dengan menggunakan alat - alat digital. Menurut Smith (1999) digitalisasi adalah proses pemindahan atau konversi bentuk dari yang awalnya berbentuk tercetak atau fisik menjadi bentuk digital yang dapat dilakukan menggunakan alat elektronik dengan melalui proses pemindaian untuk memudahkan seseorang dalam mencari data tersebut dikemudian hari. Dengan adanya digitalisasi dalam kehidupan sehari - hari dengan menggunakan alat - alat yang lebih maju manusia dapat memangkas waktu pekerjaan sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Banyak berbagai aspek kehidupan yang mulai mengembangkan teknologi digital dalam pelaksanaannya seperti pendidikan, ekonomi, agama, budaya, dan berbagai aspek penting yang lainnya.

Digitalisasi mulai merambah ke negara - negara Asia yang disebabkan adanya globalisasi dimana segala alat komunikasi datang ke pasar Asia yang dibawa oleh negara - negara barat seperti Amerika dan Uni Eropa. Dengan adanya kejadian tersebut membuat masuknya produk-produk digital yang diproduksi oleh negara barat mulai memasuki negara - negara di Asia, salah satunya adalah Indonesia. Dengan masuknya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah masyarakat Indonesia membuat pemerintah Indonesia juga turut berpartisipasi ke dalam digitalisasi yang dapat dilakukan dengan membuat kebijakan baru yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia. Digitalisasi pemerintahan sudah mulai dikembangkan pada awal tahun 2010 dimana pemerintah Indonesia mulai mengembangkan program kerja dengan memasukkan perkembangan teknologi di dalamnya.

Dengan perubahan kebijakan pemerintah yang membuat program-program yang sebelumnya dijalankan secara konvensional berubah menjadi program yang lebih maju. Dengan perubahan tersebut banyak

keuntungan yang didapatkan baik untuk masyarakat, maupun pemerintah itu sendiri seperti dengan adanya digitalisasi pemerintahan atau biasa disebut dengan *E-Government* segala urusan berkaitan dengan pengurusan administrasi menjadi lebih efisien dan efektif daripada proses pengurusan administrasi pada saat masih konvensional. Dengan adanya kemudahan ini pemerintah dapat melakukan kegiatan lain untuk mempercepat perkembangan pemerintahan di Indonesia. Dari banyaknya administrasi yang diurus oleh pemerintah yang dirubah menjadi konsep digitalisasi pemerintah, terdapat salah satu fokus pemerintah yang berkaitan dengan masalah sosial masyarakat yaitu tentang kesejahteraan sosial.

Seperti yang kita tahu bahwa kesejahteraan sosial merupakan aspek penting dalam sebuah negara. Dimana yang dianggap sebagai negara yang maju adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Jika kesejahteraan dinegara tersebut tinggi maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara yang maju. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan kondisi dimana seseorang dapat memenuhi berbagai kebutuhan material, spiritual, dan sosial dirinya sendiri untuk kegiatan sehari - hari. Selain itu, tujuan dari terciptanya Kesejahteraan sosial adalah agar mendapatkan hidup yang layak dan mampu, sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan benar (Dwi Oktaviani, Supriyanto, 2023). Kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai indikator yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu dari indikator tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan pada daerah atau negara tersebut.

Seperti yang kita tahu bahwa kemiskinan adalah masalah yang selalu menjadi perhatian masyarakat di setiap negara. Hal ini terjadi karena kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks dimana kemiskinan dapat menyerang ke beberapa aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki jumlah kemiskinan yang masih tinggi. Setidaknya sekitar 25,90 juta masyarakat di Indonesia yang berada pada garis kemiskinan. Dengan jumlah masyarakat miskin yang tergolong masih tinggi, maka diperlukan adanya tindakan nyata yang harus dilakukan oleh seluruh elemen negara untuk mengentaskan kemiskinan termasuk pemerintah baik dari posisi yang tertinggi yaitu pemerintah pusat hingga posisi yang paling rendah yaitu pemerintahan desa.

Pemerintah selaku penggerak roda sebuah negara memiliki tanggung jawab yang besar salah satunya bagaimana pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan melihat dari segala aspek kehidupan, serta dibahas secara detil hingga ke lini terkecil dan dilakukan secara sistematis (Papilaya, 2020). Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dimana pemerintah pusat maupun daerah telah bekerja sama dalam mengkoordinasi pengetasan kemiskinan yang ada di Indonesia, diantaranya pemerintah telah melakukan beberapa program yaitu program bantuan sosial atau jaminan sosial untuk keluarga tidak mampu yang telah memenuhi syarat yang ada (Susila Wati, 2022). Ketika ingin memberikan bantuan, pemerintah memiliki tahapan tersendiri dengan harapan bantuan tersebut dapat tepat sasaran. Salah satu tahapan sebelum pemberian bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan melakukan pendataan kemiskinan di setiap daerah di seluruh Indonesia.

Data kemiskinan merupakan salah satu data yang penting dalam suatu negara, dimana data tersebut adalah cikal bakal penentuan kualitas suatu negara. Maka dari itu, pendataan kemiskinan harus menjadi salah satu prioritas penting yang harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah dan dijaga kerahasiaannya sehingga tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan

data kependudukan, data kemiskinan sering berubah - ubah setiap waktu, maka dari itu pemerintah harus memperbarui data secara terus menerus sehingga data tersebut tidak terjadi kesalahan apabila ketika ingin memberikan bantuan sosial. Sebelum memasuki era digitalisasi, data kemiskinan masih sangat tidak teratur dan terkesan berantakan dimana dapat dibuktikan dengan banyaknya data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti contoh di dalam data tersebut seorang lansia masih dinyatakan hidup tetapi ketika dijumpai, lansia tersebut dinyatakan meninggal beberapa bulan yang lalu. Selain itu, juga terdapat data yang menunjukkan bahwa orang tersebut berada pada kriteria kurang mampu tetapi ketika didatangi orang tersebut sudah menjadi orang sukses dan memiliki penghasilan yang cukup sehingga bukan lagi menjadi masyarakat miskin.

Hingga akhirnya digitalisasi masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah mulai berinovasi agar data-data kemiskinan di Indonesia terhimpun menjadi satu kesatuan dan sering melakukan pembaharuan yang lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang membuat bantuan sosial menjadi salah sasaran. Kementerian sosial selaku pelaksana dari bidang sosial menjadi implementor dan inovator dalam menangani masalah kesejahteraan sosial termasuk dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Kementerian sosial membuat sebuah inovasi dalam urusan pendataan kemiskinan dimana data tersebut diberi nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. DTKS adalah data rujukan awal yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial (Andinoris Betah & Dermawan, 2022). Pada data tersebut terdapat data tentang masyarakat yang tidak mampu mulai dari nama, lokasi tempat tinggal, NIK, dan juga bantuan - bantuan yang telah didapatkan oleh orang tersebut. DTKS dihimpun menjadi satu melalui aplikasi yang juga telah disiapkan oleh

Kementerian Sosial yang bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*New Generation* atau biasa disingkat menjadi SIKS - NG.

Aplikasi SIKS-NG adalah salah satu terobosan terbaru dalam pemerintahan dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi manajemen data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditugaskan dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan data baru serta perbaikan basis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Aplikasi tersebut dioperasikan untuk memperoleh data ringkasan seperti rekapitulasi dan hasil perbaikan serta pengusulan baru. Dengan adanya inovasi ini dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan kegiatan pemberian bantuan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran. Inovasi ini diluncurkan pada tahun 2017 dan di koordinir langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di bawah naungan Pusdatin Kensos Kementerian sosial. Dimana setiap dinas sosial di seluruh Indonesia dapat mengakses aplikasi tersebut untuk mengajukan masyarakat yang kurang mampu.

Kabupaten Gresik adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dimana kabupaten tersebut bersebelahan langsung dengan Kota Surabaya dan menjadi pusat industri di Provinsi Jawa Timur. Meskipun menjadi pusat industri, jumlah kemiskinan di Kabupaten Gresik masih berada pada angka yang cukup tinggi. Setidaknya sebanyak 149,60 ribu jiwa di Kabupaten Gresik masih tergolong menjadi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan efek pandemi pada awal tahun 2020 hingga pada akhir 2022 yang menyebabkan turunnya stabilitas ekonomi di Indonesia sehingga bermunculan masyarakat yang menjadi kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dinas Sosial Kabupaten Gresik bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik. Maka dari itu, Dinas Sosial Kabupaten Gresik harus memastikan seluruh masyarakat di

Kabupaten Gresik sudah masuk ke dalam DTKS yang terlampir di SIKS-NG.

Terdapat tiga penelitian atau literatur terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau pandangan dalam menyusun penelitian ini yaitu (1) Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi Siks-Ng Di Dinas Sosial Kabupaten Sampang (Tajul Ulum, Muhamad Rifa'I, Annisa Purwatiningsih) 2023, (2) Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next generation* guna Meningkatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Desa Sirnoboyo Kecamatan Benjeng-Gresik) (Dwi Oktavianto, Supriyanto, 2023), dan (3) Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Di Kabupaten Gowa (Husri, Jaelan Usman, Ansyari Mone, 2021). Dimana pada penelitian - penelitian tersebut memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda.

Pada penelitian pertama ditemukan bahwa pelaksanaan pendataan DTKS di Kabupaten sampang sudah sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 3 tahun 2021 tentang DTKS namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya seperti terkandalanya pendataan kemiskinan karena adanya ketidak sesuaian data yang ada di Dinas Sosial dengan data kependudukan di Kabupaten Sampang sehingga masih banyak terjadi kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Kemudian pada penelitian kedua telah ditemukan bahwa pendataan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG di Desa Sirnoboyo, Kabupaten Gresik sudah dianggap berjalan dengan lancar karena program yang dilaksanakan dianggap telah tepat sasaran. Hal ini dikarenakan adanya pemberian pelayanan yang baik yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat dalam melaksanakan program tersebut dimana pemerintah desa memberikan sosialisasi dan *monitoring* bagi mereka yang memang membutuhkan serta memberikan pengarahan bagi masyarakat yang ingin mengusulkan dirinya untuk dimasukkan ke dalam DTKS.

Dan pada penelitian yang ketiga telah ditemukan bahwa dalam pendataan DTKS khususnya pada anak-anak terlantar dan lansia sudah dijalankan dengan baik. Kalimat tersebut diperkuat dengan adanya tindakan dari dinas sosial setempat yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang kemudian berkoordinasi dengan kecamatan serta kelurahan atau desa untuk segera mengkoordinir pendataan. Kemudian selanjutnya akan diadakan *monitoring* kepada sasaran yang sudah terdaftar ke dalam data tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pendataan kemiskinan melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang berada pada aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Gresik, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik menurut David C. Corten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial yang berada pada Kabupaten Gresik sesuai dengan teori implementasi menurut David C. Corten.

## II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian berdasarkan pada proses implementasi program pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik menurut teori implementasi dari David C. Corten (1969) yang terdiri dari 3 variabel yaitu program, pelaksana, dan sasaran. Dimana lokus penelitian ini adalah Kabupaten Gresik khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Dimana data primer pada penelitian ini diperoleh menggunakan beberapa cara yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung

dalam proses implementasi kebijakan seperti pegawai bidang pengelolaan data di Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Lurah dari kelurahan Sidokumpul

Sedangkan data sekunder diperoleh menggunakan data dari penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang sama, serta data dari situs - situs pengelola data di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu 2 bulan yakni pada bulan September hingga bulan Oktober.

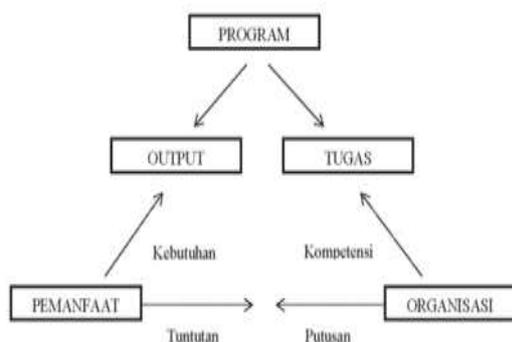
## III. PEMBAHASAN

Kementerian sosial adalah kementerian yang menaungi dan mengatur bidang sosial, yang seperti kita tahu bahwa kewajibannya adalah memberikan sebuah kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dimana langkah yang dapat dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah dengan merencanakan pemberian bantuan sosial untuk warga negara yang tidak mampu dari segi ekonomi. Pemberian bantuan sosial harus mengenai sasaran dengan tepat dan berguna oleh warga negara yang mendapatkannya sehingga dengan begitu pengentasan kemiskinan yang menjadi cita - cita bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan baik.

Untuk mewujudkan pemberian bantuan kemiskinan yang adil dan tepat sasaran, kementerian sosial memberikan sebuah inovasi berupa melakukan pendataan kemiskinan yang kemudian diberi nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dimana pendataan kemiskinan dilakukan dengan cara mendata masyarakat miskin di setiap daerah di Indonesia dan juga mendata bantuan apa saja yang sudah diterima oleh masyarakat tersebut. Kementerian sosial juga memberikan arahan kepada seluruh dinas sosial yang ada pada setiap kabupaten dan kota yang berada di Indonesia untuk segera melakukan pendataan DTKS di daerahnya masing-masing, termasuk di Kabupaten Gresik.

Pada Kabupaten Gresik sendiri pendataan DTKS sudah berjalan sesuai dengan arahan oleh kementerian sosial dimana dinas sosial sudah memberikan arahan kepada desa dan kelurahan yang tepat di Kabupaten Gresik untuk membantu mereka dalam melakukan pendataan DTKS. Maka dari itu, bidang kesejahteraan rakyat (kesra) setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik memiliki operator aplikasi SIKS-NG untuk membuat pengajuan DTKS di tempat mereka bekerja. Dalam pengajuan untuk masuk ke DTKS dapat dilakukan secara mandiri dan melalui pemerintah desa, dengan memberikan dan mengunggah kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan foto rumah ke aplikasi SIKS - NG.

Pengukuran implementasi program pendataan DTKS di Kabupaten Gresik pada penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut David C. Corten (1969) yang terdiri dari tiga variabel yaitu Program, Organisasi, dan Pemanfaat. Corten menyatakan bahwa implementasi sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila ketiga variabel tersebut saling menyesuaikan dan saling melengkapi satu sama lain.



*Gambar 1. Bagan teori implementasi Menurut David C. Corten*

Corten menjelaskan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan organisasi pelaksana dan pemanfaat atau sasaran dari program tersebut. Dimana pada penyesuaian antara program dan pemanfaat menjelaskan bahwa

program tersebut memiliki penawaran yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan hubungan antara program dengan organisasi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut harus dilakukan oleh organisasi yang memiliki kemampuan atau berkompeten dalam menjalankan program tersebut. Sedangkan hubungan antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana adalah adanya kesinambungan antara ketentuan yang telah ditentukan oleh organisasi atau instansi untuk mendapatkan atau menjadi bagian sebagai kelompok sasaran dalam program tersebut dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh organisasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi kelompok sasaran dari program tersebut.

Dalam pelaksanaan program pendataan DTKS di Kabupaten Gresik dapat dikatakan berjalan dengan bagus dan sesuai dengan teori David C. Corten dan juga arahan dari kementerian sosial. Dimana pemanfaat atau sasaran kelompok kebijakan dari program tersebut adalah masyarakat yang tidak mampu. Program tersebut memiliki manfaat dan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Gresik dimana tujuan program itu ialah untuk memasukkan warga tersebut ke dalam data masyarakat miskin yang kemudian nantinya akan diberikan bantuan sosial yang dapat membantu masyarakat tersebut memenuhi kebutuhan mereka sehari - hari.

Tidak hanya bantuan sosial saja yang memerlukan DTKS, tetapi bantuan-bantuan sektor lain juga memerlukan data dari DTKS. Bantuan tersebut seperti bantuan KIS dan BPJS yang digunakan untuk mendapatkan bantuan kesehatan sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik walaupun terhalang oleh biaya. Dan juga ada program bantuan KIP di bidang pendidikan yang dapat menolong anak-anak yang tidak mampu untuk tetap mengenyam pendidikan

yang bagus tanpa perlu memikirkan biaya sepeserpun. Lalu terdapat bantuan DBH CHT yang dimana bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu yang bekerja pada sektor pertanian cengkeh dan buruh pabrik rokok.

Kemudian pada kesesuaian antara program dengan organisasi, yang menjelaskan bahwa adanya kesinambungan antara program dengan kemampuan dari organisasi pelaksana. Pada Kabupaten Gresik Program DTKS dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang juga bekerja sama dengan bidang kesejahteraan rakyat di masing-masing kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara organisasi dengan program dimana organisasi yang menaungi memang berkompeten pada bidang sosial dan memahami bagaimana cara mengelola data kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Dan juga Dinas Sosial Kabupaten Gresik merupakan organisasi tertinggi yang menaungi bidang sosial yang ada di Kabupaten Gresik sehingga mereka berhak untuk menjalankan program tersebut.

Adapun bagian kesejahteraan rakyat pada lingkup desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik juga dapat dianggap berkompeten. Hal ini dikarenakan setiap kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Gresik sudah memiliki operator aplikasi SIKS-NG yang menaungi data DTKS sehingga mereka juga sudah memahami terkait program tersebut. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program DTKS, pemerintah desa atau kelurahan merupakan langkah awal dari pengajuan DTKS dari masyarakat yang dinaungi oleh desa dan kelurahan tersebut. Sehingga mereka juga dapat mengetahui apakah masyarakat tersebut memang memerlukan bantuan sosial atau tidak sehingga sasaran dari kebijakan menjadi lebih sesuai karena apabila ada masyarakat yang tidak sesuai dari persyaratan yang diberikan oleh kementerian sosial maka akan langsung tidak diajukan oleh operator SIKS-

NG yang ada di desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik.

Meskipun organisasi yang menjalankan program pendataan DTKS ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada organisasi pelaksana program tersebut, yaitu pada lingkup pemerintah desa dimana operator aplikasi SIKS-NG di setiap desa memiliki kualitas individu yang berbeda-beda. Dinas Sosial Kabupaten Gresik mengungkapkan bahwa setiap kegiatan rutin untuk melakukan pemutakhiran data DTKS Kabupaten Gresik masih banyak yang ditemukan desa yang tidak melaporkan data yang terbaru mereka ke dinas sosial. Meskipun hal tersebut tidak menjadi masalah namun alangkah baiknya pelaporan data DTKS terbaru setiap desa dilaporkan secara rutin ke dinas sosial, kegiatan tersebut bertujuan untuk memadankan data yang ada pada sistem dengan kondisi yang ada di lokasi.

Selain itu, setiap tahunnya banyak operator aplikasi SIKS-NG yang menyatakan untuk mengundurkan diri dengan beberapa faktor yang menjadi alasan. Umumnya faktor yang digunakan adalah usia operator yang sudah tidak produktif, memiliki pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, dipindah tugaskan untuk kebagian lain oleh atasannya, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah desa harus mencari pengganti untuk menjadi operator aplikasi SIKS-NG dan melaporkan ke dinas sosial yang nantinya dinas sosial akan memberikan pengarahan dan pengajaran dari awal seputar tentang SIKS-NG dan DTKS. Dinas Sosial Kabupaten Gresik juga selalu melakukan kegiatan sosialisasi serta pengarahan secara luring bagi seluruh operator aplikasi SIKS-NG untuk membahas tentang DTKS di Kabupaten Gresik dan membahas informasi tentang perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kemudian pada kesesuaian antara organisasi dan sasaran manfaat, dimana yang dimaksud pada bagian ini adalah kesesuaian antara persyaratan - persyaratan yang telah ditentukan oleh organisasi untuk mendapatkan program tersebut dengan kondisi masyarakat yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh organisasi. Pada Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik memberikan arahan bahwa masyarakat yang berhak untuk masuk ke dalam DTKS adalah masyarakat yang tercantum ke dalam peraturan menteri sosial tahun 2021. Dimana terdapat 8 kategori masyarakat yang berhak masuk ke dalam DTKS yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, penyimpangan sosial, korban bencana, korban kekerasan, diskriminasi, serta masyarakat lainnya yang mendapatkan arahan dari kementerian sosial.

Dan pada pelaksanaannya, masyarakat yang mendaftarkan diri mereka untuk masuk ke dalam DTKS di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dimana mayoritas pendaftar program ini adalah masyarakat miskin yang umumnya sudah berusia lanjut dan juga yatim piatu yang masih berada pada usia anak-anak. Dan juga terdapat masyarakat disabilitas yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan lain sebagainya. Dan juga banyak masyarakat yang mengajukan DTKS yang berasal dari anak-anak yang kurang mampu dan memiliki harapan untuk masuk ke jenjang pendidikan perkuliahan dengan tujuan untuk mendapatkan program bantuan KIP.

Pelaksanaan pendataan kemiskinan melalui DTKS di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan lancar dengan mengutamakan pemerataan setiap desa dan kelurahan memasukkan masyarakatnya kedalam DTKS. Dan total dari seluruh masyarakat yang telah masuk ke dalam DTKS per tahun 2023 sebanyak 45% dari total seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yaitu berada pada angka

607.500 jiwa termasuk masyarakat disabilitas, anak anak yatim piatu, dan masyarakat lainnya yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial. Dan dari jumlah tersebut, banyak masyarakat yang telah mendapatkan bantuan sosial baik secara tunai maupun non - tunai seperti bantuan alat bantu jalan bagi masyarakat disabilitas, bantuan bahan pangan pokok, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya DTKS diharapkan dapat memberikan data kemiskinan yang lebih akurat sehingga pemberian bantuan sosial lebih adil dan tepat sasaran.

#### **IV. KESIMPULAN**

Menurut peneliti implementasi pendataan kemiskinan melalui DTKS di Kabupaten Gresik sudah dijalankan secara optimal meskipun terdapat beberapa hambatan yang dapat diatasi dengan baik. Hal ini berdasarkan pada hasil analisis peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut David C. Corten yang di dalam teori tersebut terdapat 3 variabel yaitu kesesuaian antara program dengan sasaran kebijakan, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan sasaran kebijakan.

Dimana pada kesesuaian antara program dengan sasaran kebijakan menjelaskan bahwa pendataan DTKS ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin atau tidak mampu yang ada di Kabupaten Gresik untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan untuk variabel kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dimana pada variabel ini program DTKS ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan operator SIKS-NG yang terdapat pada kelurahan dan desa dimana organisasi tersebut ahli dalam bidang yang menaungi program DTKS. Dan variabel terakhir yaitu kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan sasaran kebijakan dimana masyarakat yang masuk atau diajukan ke dalam DTKS di Kabupaten Gresik memang masyarakat yang masuk ke dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial

Republik Indonesia.

Meskipun dapat dijalankan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang terjadi ketika proses pelaksanaan. Kendala tersebut dari kualitas SDM operator ditingkat desa dimana banyak kejadian pengunduran diri dan pergantian dari operator SIKS-NG. Kendala - kendala tersebut dapat diatasi dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Adapun pada penelitian ini masih terdapat kekurangan di dalamnya seperti kurangnya narasumber untuk wawancara dikarenakan keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan penelitian. Lalu kurangnya literatur yang membahas tentang DTKS di Kabupaten Gresik. Dan juga teori yang digunakan oleh peneliti kurang bisa mengembangkan menjadi penelitian yang sempurna. Peneliti menyarankan kepada peneliti yang akan membahas topik yang sama dapat menggunakan teori evaluasi kebijakan atau teori manajemen pelayanan publik sehingga diharapkan penelitian lebih tepat sasaran langsung kepada kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia N.K, dkk. (2023). Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 149–154.
- Andinoris Betah, J., & Dermawan, H. (2022). Journal of Empowerment Community and Education Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Program Pejuang Muda Di Kabupaten Kepulauan Anambas. 2, 562–569.
- Harirah MS, Z., Isril, H., & Febrina, R. (2020). Politik Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2355>
- Husri, Usman, J., & Mone, A. (2021). Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 1924–1935. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden, 004185, 1–35. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>.
- Sudibyo, E. (2019). Strategi Pemerintah dalam Akurasi Pendataan Kemiskinan. *Karta Raharja*, 1(1), 21–31. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>.
- Supriyanto, D. O. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Guna Meningkatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi kasus Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng - Gresik). *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 3, 57–65.
- Susila Wati. (2022). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Skripsi UIN Ar-Raniry.
- Ulum, T., Rifa'I, M., & Purwatiningsih, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi Siks-Ng Di Dinas Sosial Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 184–187. <https://www.jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/8218>.